
**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BLITAR**

3.1 URUSAN KEPEGAWAIAN

Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 2 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.349.901.199,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.7.701.025.489,- (92,23%).

**Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025**

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.193.520.276	5.756.187.566	92,94
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.170.000	5.144.400	99,50
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.490.000	2.489.550	99,98
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.680.000	2.654.850	99,06
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.315.383.700	4.952.750.756	93,18
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.263.573.700	4.901.670.906	93,12
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	49.710.000	48.992.000	98,56
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.100.000	2.087.850	99,42
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.161.116	228.398.281	95,90
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.477.150	3.782.239	84,48

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.036.050	44.361.925	92,35
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.254.650	4.389.601	83,54
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.923.700	6.901.000	99,67
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.754.500	5.135.750	89,25
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	1.620.000	81,00
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.715.066	162.207.766	97,88
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	0	0	0
5.1	Pengadaan Mebel	0	0	0
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.443.460	199.531.056	90,93
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.720.000	4.720.000	99,93
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.923.124	49.923.124	82,90
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.887.932	144.887.932	93,78
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.362.000	370.363.073	89,17
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	282.472.500	239.325.466	84,73
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.060.000	48.015.000	99,91
7.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.829.500	83.022.607	97,87
II	Program Kepegawaian Daerah	2.156.380.923	1.944.837.923	90,19
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	974.875.958	893.809.024	91,68
1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	290.852.058	273.222.072	93,94
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	207.174.400	204.139.017	98,53
1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	355.135.000	314.894.958	88,67
1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	121.714.500	101.552.977	83,44
2	Mutasi dan Promosi ASN	867.689.789	770.721.576	88,82

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	285.313.300	238.292.506	83,52
2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	56.121.739	54.506.250	97,12
2.3	Pengelolaan Promosi ASN	526.254.750	477.922.820	90,82
3	Pengembangan Kompetensi ASN	54.124.226	44.842.172	82,85
3.1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	54.124.226	44.842.172	82,85
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	259.690.950	235.465.151	90,67
4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	196.125.150	179.855.077	91,70
4.2	Pembinaan Disiplin ASN	63.565.800	55.610.074	87,48
	Total	8.349.901.199	7.701.025.489	92,23

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

3.1.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.1.1

**Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025**

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persentase	70%	87,89%	-
		1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Persentase	100%	100%	-
		a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	-
		b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Persentase	100%	100%	-

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	50 orang	41 orang	- Target dipersiapkan untuk pegawai yang mutasi masuk ke Pemkab Blitar karena BKPSDM sebagai tempat transit pegawai sebelum ditempatkan ke Instansi sesuai penempatan, namun sampai dengan akhir tahun tidak ada pegawai yang masuk. - Rencana tindak lanjut untuk penetapan target kinerja disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada di BKPSDM
			b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	-
			c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan	1 laporan	-
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	-	- Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan alokasi belanja, sehingga pelaksanaan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								- Upaya yang dilakukan yaitu melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi, perencanaan diklat berbasis tugas dan fungsi, serta mendorong partisipasi pegawai dalam program pendidikan dan pelatihan.
		a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	9	-	-
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Persentase	100%	100%	-
		a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1 paket	1 paket	-
		b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1 paket	1 paket	-
		c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	2 paket	2 paket	-
		d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	2 paket	2 paket	-

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2 paket	2 paket	-
			f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	-
			g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	55 laporan	55 laporan	-
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	Persentase	-	-	-
			a	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	2	-	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan alokasi belanja, sehingga pelaksanaan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. - Upaya yang dilakukan yaitu melakukan penyesuaian perencanaan kebutuhan, optimalisasi anggaran, serta prioritas pengadaan mebel sesuai kebutuhan unit kerja.

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya mesin yang diadakan	Unit	5	-	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan alokasi belanja, sehingga pelaksanaan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. - Upaya yang dilakukan yaitu Melakukan perencanaan kebutuhan yang lebih akurat, optimalisasi anggaran, serta prioritas pengadaan peralatan dan mesin sesuai kebutuhan operasional.
			6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Persentase	100%	100%	-
			a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2 laporan	2 laporan	-
			b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	24 laporan	24 laporan	-
			c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	Laporan	12 laporan	12 laporan	-

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persentase	90%	90%	-
			a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	19 unit	19 unit	-
			b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	60 unit	60 unit	-
			c	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2 unit	2 unit	-
2	Meningkatnya Kinerja ASN	II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks	92	91,57	<ul style="list-style-type: none"> - Dikarenakan adanya waktu penyelesaian layanan yang belum sepenuhnya konsisten serta pemanfaatan layanan digital yang belum optimal. - Rencana tindak lanjut dengan penguatan kepatuhan standar pelayanan serta evaluasi 	

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
							kepuasan pengguna layanan secara berkala.	
3	Meningkatnya Kualifikasi ASN	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang mendapatkan Pengangkatan dan pemberhentian yang diproses tepat waktu	Persentase	100%	100%	-
4	Meningkatnya Disiplin ASN	a	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	-
		b	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	-
		c	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	Lembaga	1 lembaga	1 lembaga	-
		d	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	-
		2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan yang terisi	Persentase	100%	89,74%	- Target tidak tercapai dikarenakan : 1. Rencana persiapan perampingan jabatan seksi pelayanan publik pada kelurahan dan kecamatan; 2. Terdapat pejabat yang pensiun tahun 2025;

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
								<p>3. Jumlah jabatan pelaksana hanya sedikit karena banyak yang lebih berminat ke jabatan fungsional.</p> <p>- Upaya yang telah dilakukan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan koordinasi dengan bagian organisasi sekretariat daerah terkait perubahan SOTK pada Kecamatan dan kelurahan dalam hal rencana perampingan jabatan seksi pelayanan publik; 2. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN sebagai bagian dari manajemen talenta guna mendukung pengisian jabatan yang lowong; 3. Menyusun kebijakan pengelolaan karier yang lebih seimbang antara jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai kebutuhan organisasi. 	
			a	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	4 dok	4 dok	-
			b	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	4 dok	4 dok	-
			c	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	4 dok	4 dok	-

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		3	Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	78	83,58	-
		a	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	150 orang	30 orang	- Target tidak tercapai dikarenakan : 1. Prioritas anggaran lebih difokuskan pada program prioritas; 2. Berkurangnya minat pegawai untuk mengikuti Ujian Dinas, Khususnya PNS yang mendekati Batas Usia Pensiun. - Upaya yang telah dilakukan adalah 1. Melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan lanjutan ASN berdasarkan kebutuhan organisasi dan prioritas jabatan; 2. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi kepada ASN terkait izin belajar, tugas belajar dan Ujian Dinas.
		4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	persentase ASN berkinerja baik	Persentase	94%	96,22%	-
		a	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				b	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	Orang	300 orang	351 orang	-

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

3.1.2 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2025 untuk Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) termuat dalam 2 (tiga) program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Kepegawaian Daerah. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program untuk Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pegawai. Kinerja program ini diukur melalui indikator "*Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran*", dengan target capaian sebesar 70 %. Berdasarkan hasil pengukuran pada Tahun 2025, tingkat kepuasan pegawai tercatat mencapai 87,89 %, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran, baik dari aspek ketepatan waktu, kemudahan prosedur, maupun dukungan sarana dan prasarana, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga diukur dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada Tahun 2025, capaian Nilai SAKIP pada BKPSDM Kabupaten Blitar mengalami kenaikan menjadi 70,55 dari capaian tahun sebelumnya sebesar 61,4. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kualitas perencanaan kinerja yang selaras antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, penguatan pengukuran dan pelaporan kinerja berbasis indikator yang terukur, serta optimalisasi tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Selain itu, peningkatan koordinasi internal dan komitmen pimpinan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) turut berkontribusi terhadap peningkatan Nilai SAKIP BKPSDM Kabupaten Blitar. Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja 100%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah “persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan” yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 100%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator “Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah” yang ditargetkan sebanyak 4 Dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 4 dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah dapat disusun tepat waktu di tahun 2025 meliputi Renja 2025, Perubahan Renja 2025, Renstra 2025-2029, Renja 2026 dan RKA 2025, RKA P 2025
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator “Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah” yang ditargetkan sebanyak 4 Dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 4 dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah, meliputi : dokumen LKJiP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Kinerja Tribunalan (I, II, III dan IV)
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja 100%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah “Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel” yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 100%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator "*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*" yang ditargetkan sebanyak 50 orang. Target dipersiapkan untuk pegawai yang mutasi masuk ke Pemkab Blitar karena BKPSDM sebagai tempat transit pegawai sebelum ditempatkan ke Instansi sesuai penempatan, namun sampai dengan akhir tahun tidak ada pegawai yang masuk. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2025 jumlah ASN yang ada di BKPSDM sebanyak 41 orang.
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator "*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*" yang ditargetkan sebanyak 4 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 4 Dokumen.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator "*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*" yang ditargetkan sebanyak 1 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 1 laporan.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja 100%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah "*Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel*" yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 100%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator "*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 1 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 1 paket.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator "*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 1 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 1 paket.
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator "*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 2 paket.

- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator *“Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan”* yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 2 paket.
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator *“Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan”* yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 2 paket.
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator *“Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan”* yang ditargetkan sebanyak 12 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 12 dokumen.
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator *“Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD”* yang ditargetkan sebanyak 55 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 55 laporan.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 100%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah *“Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu”* yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 100%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator *“Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat”* yang ditargetkan 2 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 2 laporan.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dengan indikator *“Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik”* yang ditargetkan 24 Laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 24 laporan.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator *“Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan”* yang ditargetkan 12 Laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 12 laporan.

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 80%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah "*Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik*" yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 80%.

Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

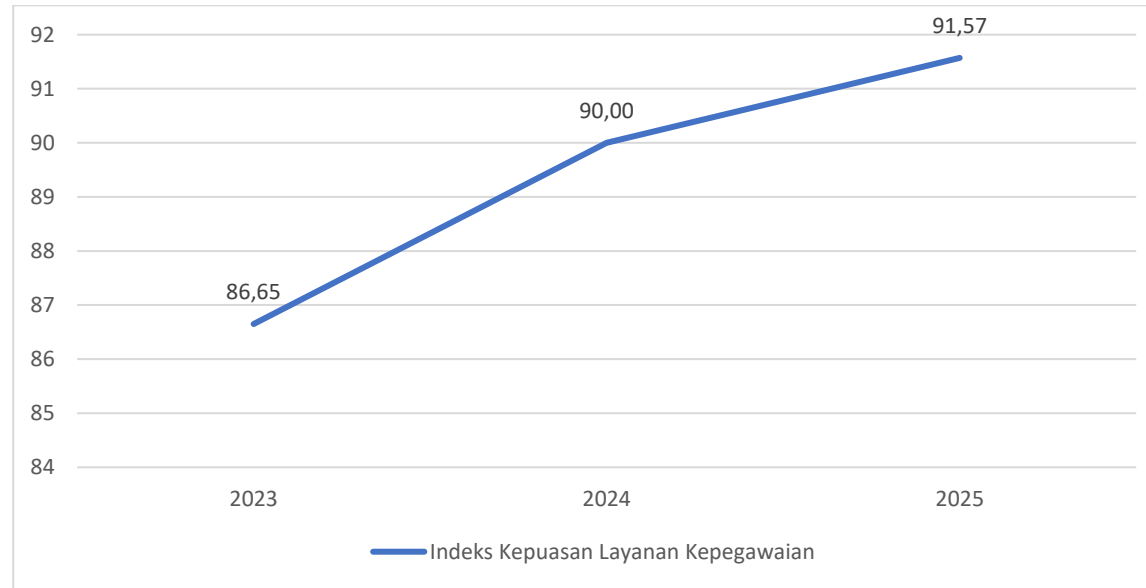
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator "*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya*" yang ditargetkan sebanyak 19 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 19 unit.
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator "*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara*" yang ditargetkan sebanyak 60 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 60 unit.
- 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator "*Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi*" yang ditargetkan sebanyak 2 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 2 unit.

2. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan target sebesar 92, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 91,57. Pengukuran indeks kepuasan tersebut dilaksanakan melalui replikasi Inovasi Pelayanan Publik e-SUKMA, sebagaimana komitmen yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

Pelaksanaan survei kepuasan layanan kepegawaian difasilitasi melalui mesin anjungan dan pemindaian barcode tautan survei yang disediakan pada banner layanan. Dalam praktiknya, pemanfaatan barcode survei masih menghadapi kendala teknis pada sebagian perangkat pengunjung, sehingga mesin anjungan perpustakaan digital dimanfaatkan sebagai media alternatif survei kepuasan layanan kepegawaian. Hasil survei tersebut secara otomatis

terekam dalam aplikasi e-SUKMA dan menunjukkan capaian Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Tahun 2025 sebesar 91,57.



Gambar 1 Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Kabupaten Blitar Tahun 2023 - 2025

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan pergerakan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian pada gambar di atas dapat disampaikan bahwa capaian Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Tahun 2025 sebesar 91,57. Capaian tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan target sebesar 92, yang antara lain dipengaruhi oleh belum konsistennya waktu penyelesaian layanan serta pemanfaatan layanan kepegawaian berbasis digital yang belum optimal. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus mengupayakan peningkatan kualitas layanan kepegawaian melalui penguatan standar pelayanan, peningkatan konsistensi waktu layanan, serta optimalisasi pemanfaatan layanan digital bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Capaian kinerja Program Kepegawaian Daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu:

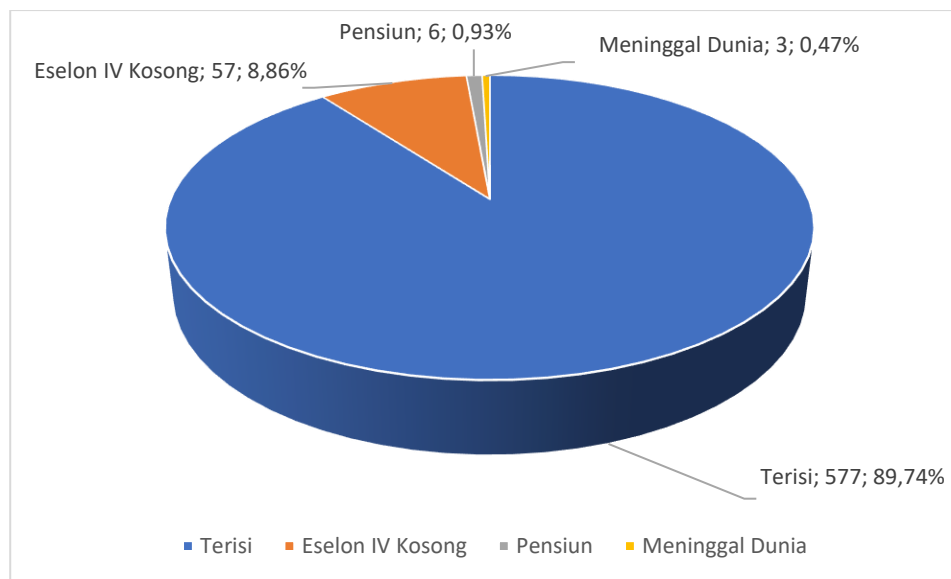
1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan target kinerja 100%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah *“Persentase ASN yang mendapatkan Pengangkatan dan Pemberhentian yang diproses tepat waktu”* yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 100%. Meski demikian, untuk serapan anggaran pada kegiatan ini hanya dapat direalisasikan sebesar 91,68% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp893.809.024,00. Hal ini dikarenakan pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan 1 Tahap dimana Rangkaian seleksi PPPK dilaksanakan dibulan Mei tahun 2025 sesuai Juknis Pelaksanaan Seleksi PPPK Paruh waktu dari BKN, penyelenggaraan rekrutmen diperuntukan formasi PPPK paruh waktu dengan jumlah formasi sebanyak 1720 orang, dilaksanakan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan indikator *“Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK”* yang ditargetkan sebanyak 6 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 6 dokumen.
 - 2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan indikator *“Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian”* yang ditargetkan sebanyak 3 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan.
 - 3) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan indikator *“Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi”* yang ditargetkan 1 lembaga. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 1 lembaga.
 - 4) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan indikator *“Jumlah Dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian”* yang ditargetkan 4 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 4 dokumen.

2. Mutasi dan Promosi ASN dengan target kinerja 100%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah "*Persentase jabatan yang terisi*" yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 89,74% hal tersebut disebabkan oleh:

- 1) Rencana persiapan perampingan jabatan seksi pelayanan publik pada kelurahan dan kecamatan;
- 2) Pejabat memasuki batas usia pensiun;
- 3) Kekurangan jabatan pelaksana yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan pengawas;

Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengelolaan Mutasi ASN dengan indikator "*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah*" yang ditargetkan 4 (empat) dokumen telah terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan.
- 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan indikator "*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*" yang ditargetkan 4 dokumen telah terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan.
- 3) Pengelolaan Promosi ASN dengan "*indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*" yang ditargetkan 4 (empat) dokumen telah terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan.



Gambar 2 Keterisian Jabatan Struktural pada Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

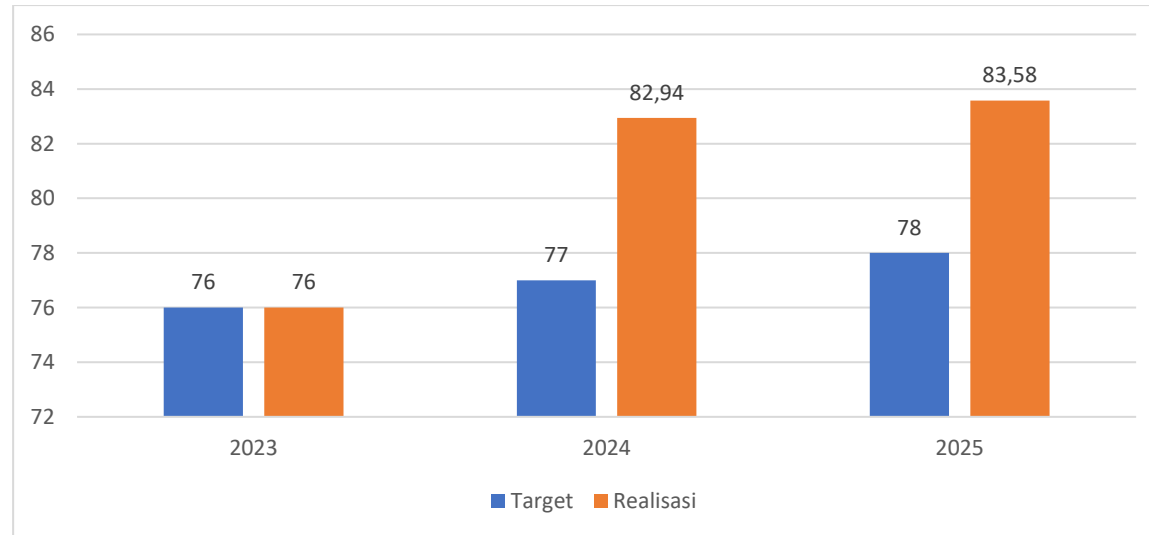
Berdasarkan komposisi jabatan struktural sebagaimana tergambar dalam diagram, dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2025 capaian persentase jabatan struktural yang terisi sebesar 89,74 persen dari target kinerja 100 persen. Belum optimalnya capaian tersebut dipengaruhi oleh adanya pejabat yang memasuki batas usia pensiun, serta adanya rencana penataan dan perampingan jabatan Seksi Pelayanan Publik pada kelurahan dan kecamatan. Selain itu, minat ASN terhadap jabatan pelaksana relatif terbatas karena kecenderungan memilih jabatan fungsional, sehingga berdampak pada terbatasnya ketersediaan pejabat untuk mengisi jabatan struktural tertentu.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, BKPSDM telah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi terkait penyesuaian struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan, khususnya dalam rangka perampingan jabatan Seksi Pelayanan Publik. Selain itu,

pengembangan kompetensi ASN terus dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan manajemen talenta guna mendukung pengisian jabatan yang lowong, serta disusun kebijakan pengelolaan karier ASN yang lebih seimbang antara jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Pengembangan Kompetensi ASN, pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target kinerja sebesar 78 persen, dengan indikator kinerja berupa “Rasio Pegawai Berpendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)”. Hingga akhir Tahun 2025, realisasi indikator tersebut mencapai 83,58 %, sehingga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tingkat pendidikan ASN secara agregat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain melalui Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan indikator Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan, yang pada periode pelaporan ditargetkan sebanyak 150 ASN. Namun hingga akhir Tahun 2025, realisasi subkegiatan ini baru mencapai 30 ASN. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya minat ASN untuk mengikuti ujian dinas, khususnya bagi pegawai yang telah mendekati batas usia pensiun, serta adanya kebijakan prioritas anggaran yang lebih difokuskan pada program-program prioritas daerah.



Gambar 3 Rasio Pegawai Berpendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan data Rasio Pegawai Berpendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) sebagaimana tergambar dalam diagram, pada Tahun 2025 capaian rasio tersebut mencapai 83,58 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 78 persen. Capaian ini didorong oleh meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi dan menengah/dasar, seiring dengan kebijakan penerimaan pegawai yang mensyaratkan latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1).

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target kinerja 97%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah “*Persentase ASN Berkinerja Baik*” yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi sebesar 96,22%, hal tersebut disebabkan oleh :

- 1) Adanya ASN yang terkena hukuman disiplin;
- 2) Adanya jabatan yang tidak diwajibkan membuat SKP seperti PPPK Paruh Waktu Angkatan 2025 belum diwajibkan membuat SKP Tahun 2025.

Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator "*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*", telah tercapai sebanyak 1 dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen.
- 2) Pembinaan Disiplin ASN dengan indikator "*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*", telah tercapai sebanyak 351 ASN dari target sebanyak 300 ASN. Hal ini disebabkan banyaknya OPD yang mengundang BKPSDM untuk mensosialisasikan tentang pembinaan kedisiplinan ASN, sehingga sosialisasi ini tidak hanya menggunakan anggaran yang tersedia di BKPSDM, namun juga menggunakan anggaran dari masing-masing OPD yang mengundang untuk permintaan sosialisasi tentang pembinaan kedisiplinan ASN.

3.1.3 Capaian Indikator Kinerja

Untuk mengukur hasil penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, berikut disajikan realisasi Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025.

Sesuai dengan Renstra BKPSDM tahun 2025 – 2029, BKPSDM menetapkan indikator tujuan berupa "Indeks Sistem Merit" dengan target tahun 2025 sebesar 275, dan indikator sasaran berupa "Indeks Profesionalitas ASN" dengan target sebesar 71,53. Capaian atas indikator tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 272 dari target yang ditetapkan sebesar 275. Capaian tersebut merujuk pada hasil penilaian terakhir yang ditetapkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 206/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dengan nilai Indeks Sistem Merit Tahun 2022 sebesar 272.

Seiring dengan adanya pelimpahan kewenangan penghitungan Indeks Sistem Merit dari KASN kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Tahun 2025 belum dilakukan penilaian dan penghitungan Indeks Sistem Merit oleh BKN pada Pemerintah Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, capaian Indeks Sistem Merit pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 masih menggunakan hasil pengukuran terakhir yang ditetapkan oleh KASN, sehingga nilai capaian Indeks Sistem Merit pada periode tersebut dianggap sama dengan capaian Tahun 2023, yaitu sebesar 272.

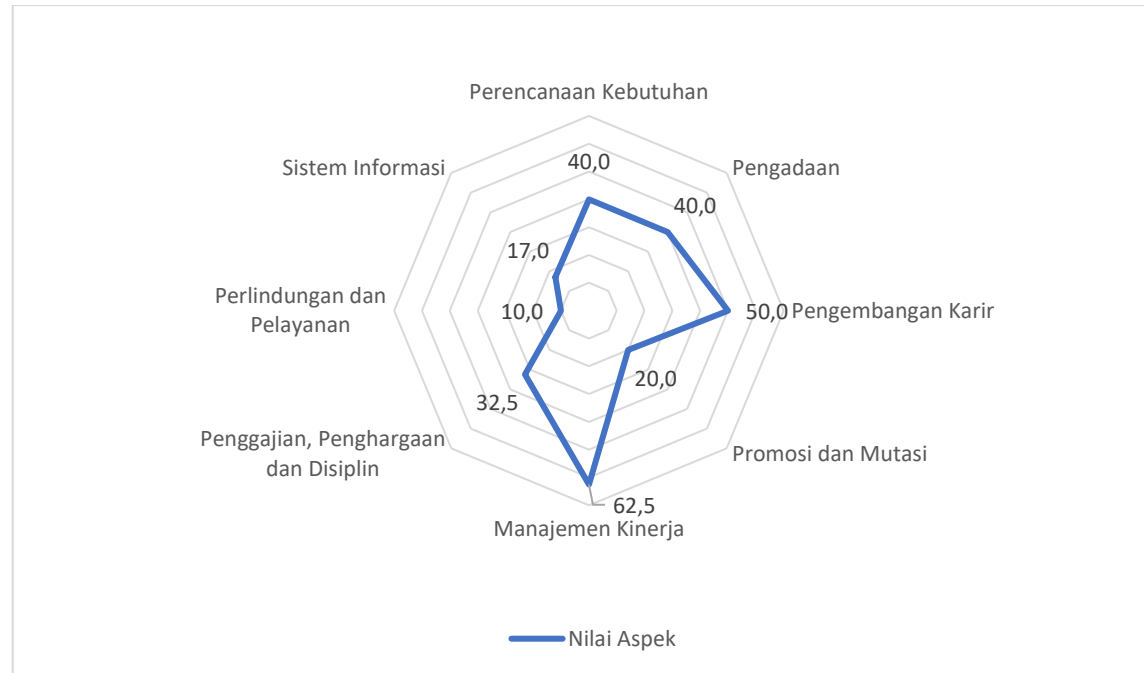
Pemerintah Kabupaten Blitar tetap berkomitmen untuk memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN melalui pengembangan manajemen talenta, peningkatan kualitas pengisian jabatan berbasis kompetensi, serta penguatan sistem dan tata kelola kepegawaian, sebagai upaya peningkatan nilai Indeks Sistem Merit pada periode penilaian berikutnya.

Tabel 3
Capaian Indeks Sistem Merit Tahun 2023 - 2025

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2023	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Sistem Merit	272	300	272*	275	272*

*Keterangan : * Nilai realisasi pada Tahun 2024 dan 2025 merujuk pada hasil pengukuran Tahun 2023 dikarenakan belum melakukan penilaian sistem merit secara tersistem oleh BKN.*

Sumber: BKPSDM Kab. Blitar, 2025



Gambar 4 Capaian Nilai Aspek Penyusun Indeks Sistem Merit Kabupaten Blitar

Sumber: BKPSDM Kab. Blitar, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa capaian tertinggi aspek penyusun Indeks Sistem Merit Kabupaten Blitar terdapat pada Manajemen Kinerja dengan nilai 62,5, diikuti Pengembangan Karier sebesar 50,0, serta Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan yang masing-masing mencapai 40,0, yang menandakan aspek-aspek tersebut relatif lebih berkembang. Sementara itu, capaian masih rendah pada aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin (32,5), Promosi dan Mutasi (20,0), Sistem Informasi (17,0), serta Perlindungan dan Pelayanan (10,0), sehingga memerlukan penguatan lebih lanjut agar penerapan Sistem Merit di Kabupaten Blitar dapat berjalan secara lebih seimbang, terintegrasi, dan optimal.

2. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)

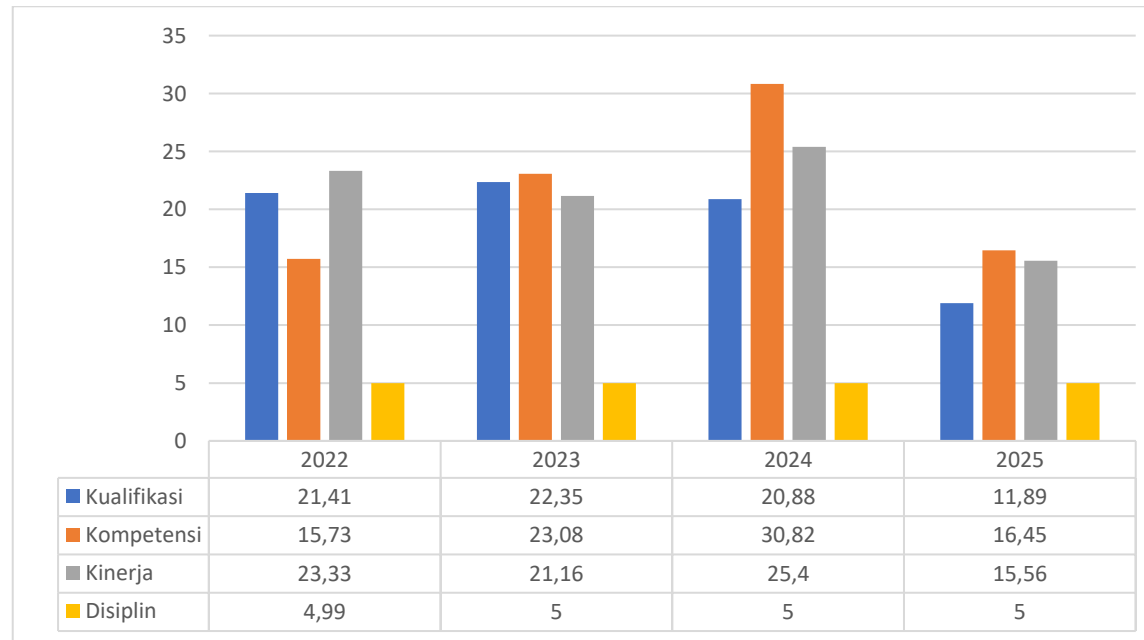
Mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, IP-ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran IP-ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. Pengukuran IP-ASN juga bermanfaat bagi pemerintah untuk dipergunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya, serta kemanfaatan bagi ASN dalam rangka peningkatan kuadran profesionalisme ASN. Selain itu, IP-ASN juga sebagai kontrol sosial bagi masyarakat agar ASN dapat secara profesional dalam memberikan pelayanan publik. Terkait Pengukuran IP-ASN berdasarkan surat BKN Nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, BKN menginformasikan seiring dengan penerapan Manajemen Talenta Instansi Pemerintah dan Penggabungan Indeks dalam Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN namun Instansi Pemerintah yang menggunakan data hasil pengukuran Indeks Profesionalitas sebagai dasar penyusunan kinerja dan/atau rencana strategis Instansi tetap dapat diakses hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN hingga tahun pengukuran Tahun 2024 pada Layanan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN SIASN dan MyASN.

Pengukuran IP-ASN mencakup 4 Indeks Dimensi, yakni Indeks Dimensi Kualifikasi (25), Indeks Dimensi Kompetensi (40), Indeks Dimensi Kinerja (30), dan Indeks Dimensi Disiplin (5). Adapun kategori predikat dalam penilaian IP-ASN adalah Sangat tinggi (91-100), Tinggi (81-90), Sedang (71-80), Rendah (61-70) dan Sangat Rendah (60 kebawah). Untuk Tahun 2024 ini capaian IP-ASN tidak dapat disajikan karena sampai dengan laporan ini disusun hasil penilaian resmi belum dirilis oleh BKN. Capaian IP-ASN dari tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025 tersaji pada tabel 5.

Tabel 5
Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Blitar Tahun 2022-2025

Indeks Profesionalitas ASN	Bobot	2022	2023	2024	2025
Indeks Dimensi Kualifikasi	25	21,41	22,35	20,88	11,89*
Indeks Dimensi Kompetensi	40	15,73	23,08	30,82	16,45
Indeks Dimensi Kinerja	30	23,33	21,16	25,40	15,56
Indeks Dimensi Disiplin	5	4,99	5	5	5
Total		65,46	71,59	82,09	48,90

**Data dari Aplikasi Sidawai per 4 Februari 2026*
Sumber: BKPSDM Kab. Blitar, 2026



Gambar 5 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Blitar Tahun 2022-2025

Sumber: BKPSDM Kab. Blitar, 2026

Berdasarkan Tabel 5/Gambar5, capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2024 mencapai nilai 82,09 dan berada pada kategori **Tinggi**. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan Tahun 2022 dan Tahun 2023, serta menjadi catatan positif bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengelolaan sumber daya aparatur. Tren peningkatan IP-ASN pada periode Tahun 2022–2024 tercermin dari kenaikan nilai indeks dari 65,46 pada Tahun 2022 menjadi 71,59 pada Tahun 2023, dan selanjutnya meningkat menjadi 82,09 pada Tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh perbaikan pada Indeks Dimensi Kompetensi dan Indeks Dimensi Kinerja ASN.

Namun demikian, pada Tahun 2025 capaian IP-ASN mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 48,90. Penurunan nilai tersebut hingga batas waktu pelaporan disebabkan oleh belum optimalnya partisipasi ASN dalam melakukan pemutakhiran data pada aplikasi kepegawaian, sehingga sebagian data terkait kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN belum sepenuhnya terekam dan tercermin dalam perhitungan IP-ASN. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penurunan nilai pada beberapa dimensi indeks.

Menindaklanjuti hal tersebut, BKPSDM terus melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada ASN mengenai pentingnya pemutakhiran data kepegawaian, mengoptimalkan peran admin kepegawaian pada perangkat daerah, serta melaksanakan monitoring dan pengingat secara berkala. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pembaruan data yang lebih tepat waktu dan akurat, sehingga capaian IP-ASN ke depan dapat kembali meningkat dan diarahkan untuk mencapai kategori **Sangat Tinggi**.

3.1.4 Permasalahan dan Penyelesaian

a. Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada Tahun 2025 yaitu :

1. Pencapaian target Kegiatan mutasi dan Promosi ASN sebesar 100% terrealisasi 89,74% disebabkan, antara lain:
 - a. Rencana persiapan perampingan jabatan seksi pelayanan publik pada kelurahan dan kecamatan;
 - b. Pejabat memasuki batas usia pensiun;

- c. Kekurangan jabatan pelaksana yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan pengawas.
 2. Pencapaian target sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN sebesar 150 orang terealisasi hanya 30 orang disebabkan antara lain:
 - a. Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas berkurang dikarenakan persyaratan penerimaan pegawai minimal S1;
 - b. Minat pegawai untuk mengikuti Ujian Dinas berkurang karena PNS tersebut sudah mendekati BUP;
 - c. Prioritas anggaran diarahkan pada program prioritas.
 3. Pencapaian target kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebesar 97% terrealisasi 96,22%, hal tersebut disebabkan oleh :
 - a. Adanya ASN yang terkena hukuman disiplin;
 - b. Adanya jabatan yang tidak diwajibkan membuat SKP seperti PPPK Paruh Waktu Angkatan 2025 belum diwajibkan membuat SKP Tahun 2025.
- b. Solusi
- Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :
1. Melakukan penataan kelembagaan secara bertahap dan terencana terkait perampingan jabatan Seksi Pelayanan Publik pada kelurahan dan kecamatan;
 2. Melakukan pemetaan dan pengembangan kompetensi jabatan pelaksana melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan karier agar memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan pengawas;
 3. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada ASN mengenai manfaat pendidikan lanjutan dan pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja dan karier;
 4. Melakukan penyesuaian target peserta pendidikan lanjutan secara lebih realistis berdasarkan hasil pemetaan jumlah PNS yang memenuhi persyaratan Ujian Dinas;
 5. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin ASN secara berkelanjutan guna meminimalkan pelanggaran disiplin yang berdampak pada penilaian kinerja; dan

6. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan teknis penyusunan SKP kepada ASN dan pejabat penilai kinerja untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

3.1.5 Inovasi dan Prestasi

a. Inovasi

1) Inovasi SIDAWAI (Sistem Informasi Data Pegawai)

SIDAWAI (Sistem Informasi Data Pegawai) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mendukung pengelolaan data dan manajemen kepegawaian secara terintegrasi. Aplikasi ini berfungsi mengolah dan menyajikan data pegawai secara komprehensif, meliputi biodata pegawai serta riwayat kepegawaian seperti pengangkatan, jabatan, kepangkatan, pendidikan, hingga hukuman disiplin. Seiring pengembangannya, SIDAWAI telah menjadi basis utama (master data) kepegawaian karena memuat data pegawai yang relatif lengkap dan terintegrasi dengan berbagai layanan kepegawaian lainnya. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan web browser, serta menerapkan sistem hak akses berjenjang yang terdiri atas akun personal bagi setiap pegawai untuk pengelolaan data pribadi, akun operator pada masing-masing perangkat daerah untuk pengelolaan data pegawai OPD, dan akun administrator yang dikelola oleh BKPSDM.

Sebagai bentuk inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, SIDAWAI terus dikembangkan untuk mendukung manajemen kepegawaian yang lebih efektif, salah satunya melalui integrasi dengan sistem presensi berbasis Android (Presensi Mobile). Integrasi ini memungkinkan data presensi pegawai yang dilakukan melalui ponsel pintar pada koordinat wilayah kerja yang telah ditentukan dapat ditarik dan diolah langsung dalam SIDAWAI, yaitu secara spesifik pada Sistem Informasi Data Kehadiran (SIDARA). Dengan pengembangan tersebut, pegawai memiliki fleksibilitas dalam melakukan presensi, baik melalui mesin perekam sidik jari, mesin perekam wajah, maupun presensi berbasis Android. Inovasi ini berdampak pada meningkatnya kemudahan, akurasi, dan efektivitas

pencatatan kehadiran pegawai, serta mendukung pengelolaan data kepegawaian yang lebih tertib, terintegrasi, dan akuntabel.

2) Inovasi SENSIMOB (Presensi Mobile)

SENSIMOB (Presensi Mobile) merupakan inovasi presensi berbasis aplikasi Android yang dikembangkan sebagai respon atas kebutuhan pengelolaan kehadiran pegawai secara modern, akurat, dan real-time di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Presensi diposisikan sebagai salah satu indikator penting dalam pengukuran disiplin dan kinerja pegawai, sehingga pengelolaannya memerlukan sistem yang andal dan efisien, terutama dalam menghadapi jumlah pegawai yang besar dan kebutuhan pembaruan data yang berkelanjutan. Melalui SENSIMOB, data kehadiran pegawai dapat dipantau secara langsung dan terintegrasi, sekaligus berfungsi sebagai instrumen pendukung penerapan reward and punishment. Pengembangan presensi mobile ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam mematuhi ketentuan jam kerja serta mengefektifkan dan mengefisiensikan pemenuhan data kehadiran. Dampak implementasi SENSIMOB tidak hanya meningkatkan akurasi data presensi, tetapi juga mendukung sistem manajemen kinerja, di mana skor kinerja pegawai dalam aplikasi SIDARA digunakan sebagai salah satu komponen perhitungan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai.

3) Inovasi SITAMPAN (Sistem Informasi Tambahan Penghasilan)

SITAMPAN (Sistem Informasi Tambahan Penghasilan) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BKPSDM untuk mendukung pengelolaan tambahan penghasilan pegawai secara terintegrasi, objektif, dan akuntabel. Aplikasi ini mengolah data skor presensi yang bersumber dari aplikasi SIDARA serta data skor kinerja yang berasal dari aplikasi E-KINERJA, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perhitungan besaran tambahan penghasilan pegawai. Dalam pengembangannya, SITAMPAN dilakukan penyempurnaan database, khususnya terkait penyesuaian nomenklatur jabatan sesuai dengan validasi Kementerian PAN dan RB serta pembaruan nilai nominal jabatan. Selain itu, sistem ini juga mengakomodasi indikator tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blitar tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Implementasi SITAMPAN memberikan dampak signifikan dalam memudahkan

instansi dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola, memantau, dan mempertanggungjawabkan laporan tambahan penghasilan pegawai secara lebih efektif dan transparan.

LAMPIRAN
VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu Formasi Tahun 2025
Tanggal Pelaksanaan : 19 Desember 2025
Tempat : Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Blitar



Link Foto : [Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu Tahun 2025.jpeg](#)

Kegiatan Pelaksanaan Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu Formasi Tahun 2025 dilaksanakan bertempat di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Blitar pada tanggal 19 Desember 2025. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 1720 peserta.

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II Tahun 2025
Tanggal Pelaksanaan : 10 Mei 2025
Tempat : Gedung Sasana Budaya, Universitas Negeri Malang



Link Foto : [Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II Tahun 2025.jpeg](#)

Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II Tahun 2025 dan dilaksanakan di Kota Malang bertempat di Gedung Sasana Budaya, Universitas Negeri Malang pada tanggal 10 Mei 2025. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 1.733 peserta yang dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi dan dilanjutkan seleksi kompetensi dengan *Sistem Computer Assisted Test (CAT)*.

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Orientasi Persiapan Pensiun (OPP)/Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar
Tanggal Pelaksanaan : 21-25 Juli 2025
Tempat : UPT Balai Latihan Kerja Wonojati Malang



Link Foto : [Foto Kegiatan OPP 21-25 Juli 2025.jpeg](#)

Pelaksanaan Orientasi Persiapan Pensiun (OPP)/Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan dilaksanakan di UPT Balai Latihan Kerja Wonojati Malang pada tanggal 21-25 Juli 2025. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 30 peserta.

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025
Tanggal Pelaksanaan : 13 November 2025
Tempat : Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Blitar



Link Foto : [Pelantikan JPT 13 November 2025.jpeg](#)

Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025 dan dilaksanakan di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Blitar pada tanggal 13 November 2025. Pegawai yang dilantik sebanyak 10 orang jabatan tinggi pratama.

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Ujian Dinas dan ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar
Tanggal Pelaksanaan : 17 Agustus 2025
Tempat : Gedung Assesment Center BKD Propinsi Jawa Timur



Link Foto : [Ujian Dinas dan UPKP 17 Agustus 2025.jpeg](#)

Pelaksanaan Ujian Dinas dan ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar dan dilaksanakan di Gedung Assesment Center BKD Propinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 2025. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 30 peserta.

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

3.2 URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.417.282.550,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.348.090.250,- (95,12%).

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.417.282.550	1.348.090.250	95,12
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	238.988.250	195.133.680	81,65
1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	238.988.250	195.133.680	81,65
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.178.294.300	1.152.956.570	97,85
2.1	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	619.518.200	602.265.000	97,22
2.2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	558.776.100	550.691.570	98,55
	Total	1.417.282.550	1.348.090.250	95,12

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

3.2.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.2.1

**Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025**

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Meningkatnya Kompetensi ASN	III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	Persentase	90%	70,34%	-
		1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yg mengikuti diklat kompetensi teknis dan fungsional	Persentase	60%	29,37%	Target tidak tercapai karena: 1. Tidak adanya pemanggilan kediklatan dari lembaga penyelenggara Diklat; 2. Kurangnya kesadaran pegawai untuk mengupdate data kompetensi/sertifikat kedalam aplikasi sidawai. Upaya yang telah dilakukan sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai metode pengembangan kompetensi, baik melalui diklat klasikal,

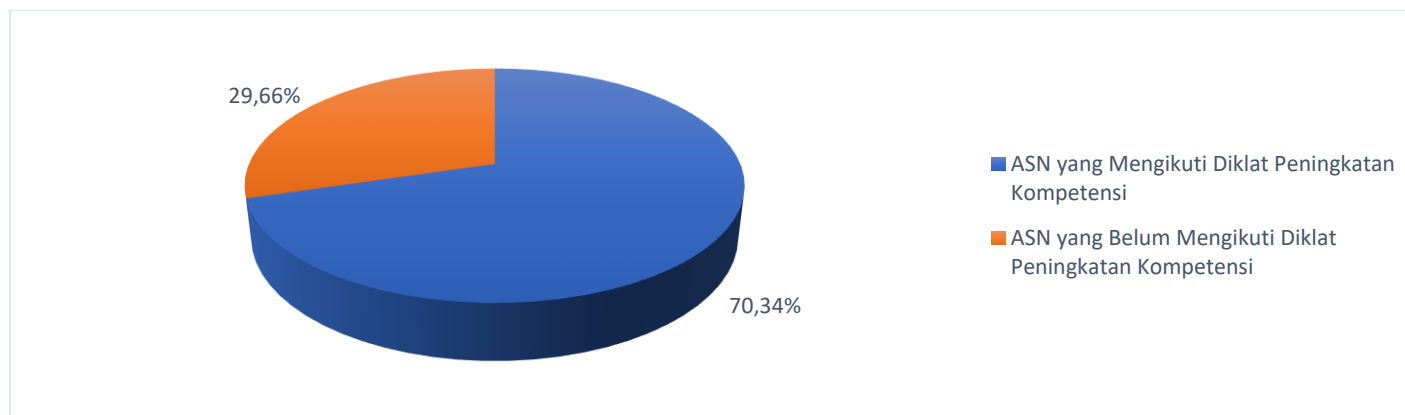
No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
							nonklasikal, maupun pembelajaran daring; 2. Melaksanakan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan sebagai dasar penetapan peserta diklat.	
		a	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	160 orang	3.231 orang	
		2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase	50%	40,96%	-
		a	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup kab/kota	Orang	95 orang	4.506 orang	-

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			b	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan	3 laporan	3 laporan	-

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

3.2.2 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2025 untuk Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) termuat dalam 1 (satu) program, yakni Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Indikator capaian program ini adalah *"Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi"*. Adapun capaian atas program adalah sebesar 70,34% dari target 90%.



Gambar 6 Komposisi ASN Pemerintah Kabupaten Blitar Berdasarkan Partisipasi Diklat Peningkatan Kompetensi Tahun 2025

Sumber: BKPSDM Kab. Blitar, 2025

Dari Gambar 1 dapat diketahui persentase ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi sejumlah 70,34%, atau sebesar 7.737 ASN dari total ASN Kabupaten Blitar pada akhir Tahun 2025 sebesar 10.999 orang. Secara umum realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia belum dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 85%, karena terdapat penambahan jumlah ASN melalui pengangkatan PPPK Angkatan II Tahun 2025 pada Oktober 2025 sebanyak 275 orang dan PPPK paruh waktu pada Desember 2025 sebanyak 1.720 orang. Karena pengangkatan dimaksud dilaksanakan mendekati akhir tahun 2025, maka PPPK Angkatan II dan PPPK paruh waktu belum sempat mengikuti diklat peningkatan kompetensi.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Pengembangan Kompetensi Teknis

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja ASN sesuai dengan bidang tugas, jabatan, dan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan melalui berbagai bentuk pembelajaran, baik pendidikan dan pelatihan klasikal,

nonklasikal, maupun pembelajaran daring, yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi jabatan dan perkembangan kebijakan nasional. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penguatan kapasitas ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dan akuntabel.

Indikator Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis berupa “Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi teknis dan fungsional” pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 60 %. Namun demikian, realisasi capaian indikator tersebut baru mencapai 31,35 %. Belum tercapainya target kinerja ini dipengaruhi oleh keterbatasan penyelenggaraan diklat dan uji kompetensi fungsional dari lembaga penyelenggara diklat, serta belum optimalnya pemutakhiran data pengembangan kompetensi ASN, khususnya dalam hal unggah sertifikat kompetensi pada aplikasi SIDAWAI.

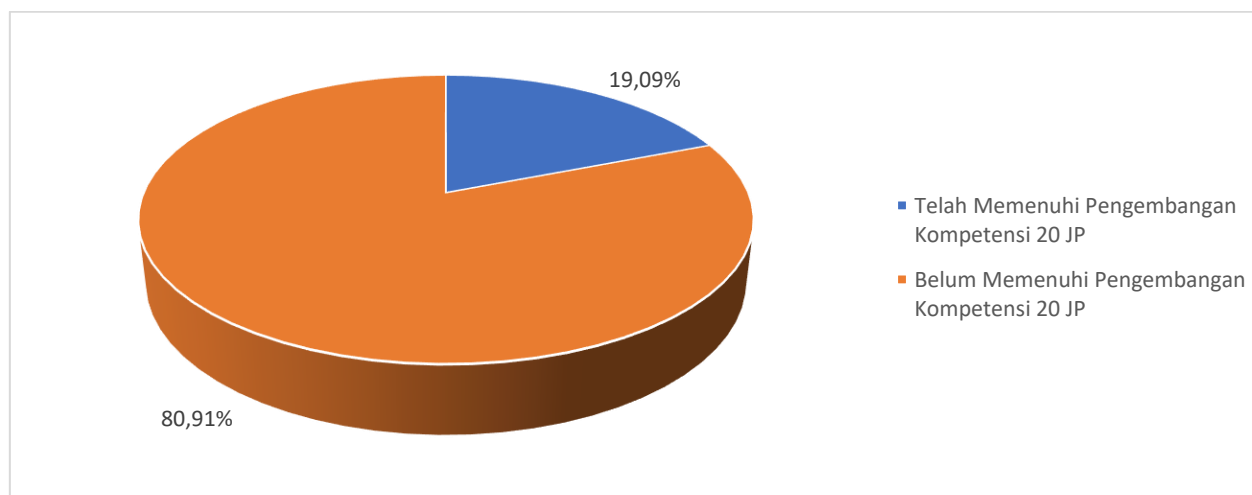
Menyikapi kondisi tersebut, ke depan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM akan melakukan upaya perbaikan melalui optimalisasi berbagai metode pengembangan kompetensi ASN, baik melalui pendidikan dan pelatihan klasikal, nonklasikal, maupun pembelajaran daring. Selain itu, akan dilakukan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan sebagai dasar penetapan peserta diklat yang lebih tepat sasaran, guna mendukung peningkatan kompetensi aparatur secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional diukur dengan indikator kinerja yakni *“Persentase ASN yg mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional”* dengan target 50% dan tercapai sebesar 40,96%. Pelaksanaan Assesment Pengawas bekerja sama dengan BKN dengan metode CACT. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap, diperuntukan hanya pada Pejabat Pengawas dan Pelaksana.

3.2.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan dan Pelatihan diukur melalui indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP), dengan ketentuan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 JP setiap tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Lebih lanjut, pengembangan kompetensi ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilaksanakan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pejabat pembina kepegawaian untuk menetapkan kebutuhan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengembangan kompetensi ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.



Gambar 7 Distribusi ASN Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) Tahun 2025

Sumber: BKPSDM Kab. Blitar, 2025

Pengukuran indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Blitar melalui Aplikasi SIDAWAI, yang mewajibkan setiap ASN melakukan pemutakhiran data serta mengunggah bukti pengembangan kompetensi berupa sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pelatihan. Hingga tanggal 10 Februari 2026, capaian persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi minimal 20 JP tercatat sebesar 19,09%, masih belum mencapai target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 28,81%. Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain: 1) masih rendahnya kesadaran ASN dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi; 2) belum optimalnya tertib administrasi ASN dalam melakukan pemutakhiran data pengembangan kompetensi, serta 3) adanya kendala teknis pengelolaan Aplikasi SIDAWAI pasca insiden serangan siber pada pertengahan Tahun 2025. Untuk menjaga keamanan data, akses aplikasi SIDAWAI saat ini dibatasi hanya melalui jaringan Kominfo Kabupaten Blitar, yang berdampak pada terbatasnya akses ASN di unit kerja yang belum terjangkau jaringan tersebut, seperti UPT SD, UPT SMP, dan UPT Puskesmas.

Sebagai upaya tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui BKPSDM akan meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada ASN terkait kewajiban pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun serta pentingnya pemutakhiran data secara tertib dan berkelanjutan. Selain itu, akan dilakukan penguatan peran admin kepegawaian pada perangkat daerah dan unit kerja sebagai pendamping teknis ASN dalam pengelolaan data pengembangan kompetensi. Pemerintah Kabupaten Blitar juga akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk melakukan pemulihan dan optimalisasi akses Aplikasi SIDAWAI secara bertahap, termasuk pengembangan skema akses yang aman bagi unit kerja di luar jaringan Kominfo, guna mendukung peningkatan capaian indikator pada tahun berikutnya.

3.2.4. Permasalahan dan Penyelesaian

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ditengarai menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan, sebagai berikut:

1. Bertambahnya jumlah ASN di akhir tahun anggaran, khususnya melalui pengangkatan PPPK Angkatan II dan PPPK Paruh Waktu pada Oktober–Desember 2025, menyebabkan ASN yang baru diangkat belum memiliki kesempatan mengikuti diklat peningkatan kompetensi pada tahun berjalan.
2. Keterbatasan kapasitas penyelenggaraan diklat dan uji kompetensi, baik dari sisi kuota peserta maupun frekuensi pelaksanaan oleh lembaga penyelenggara diklat dan instansi pembina jabatan fungsional.
3. Belum optimalnya pemutakhiran data pengembangan kompetensi ASN, terutama dalam hal unggah sertifikat dan bukti pelatihan pada Aplikasi SIDAWAI, sehingga capaian riil tidak sepenuhnya tercermin dalam sistem pengukuran kinerja.
4. Masih rendahnya kesadaran dan komitmen ASN terhadap kewajiban pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun sebagai bagian dari pengembangan karier dan profesionalitas ASN.
5. Kendala teknis akses Aplikasi SIDAWAI pasca serangan siber, yang menyebabkan pembatasan akses hanya melalui jaringan Kominfo Kabupaten Blitar dan berdampak pada ASN di unit kerja yang belum terjangkau jaringan tersebut.

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mendorong peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui BKPSDM akan melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Integrasi perencanaan pengembangan kompetensi ASN baru, khususnya PPPK, dengan menyusun skema diklat dasar dan pengembangan kompetensi awal yang dapat dilaksanakan segera setelah pengangkatan, termasuk melalui pembelajaran daring.
2. Optimalisasi metode pengembangan kompetensi nonklasikal, seperti e-learning, webinar, coaching, mentoring, dan pembelajaran mandiri terstruktur, guna memperluas jangkauan ASN peserta tanpa bergantung sepenuhnya pada kuota diklat klasikal.

3. Pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan, berbasis jabatan dan analisis kesenjangan kompetensi, sebagai dasar penetapan peserta diklat yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada indikator kinerja.
4. Penguatan kebijakan tertib administrasi pengembangan kompetensi, melalui kewajiban unggah bukti pelatihan pada Aplikasi SIDAWAI yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, manajemen talenta, dan pengembangan karier ASN.
5. Peningkatan sosialisasi dan internalisasi kewajiban 20 JP per tahun, dengan menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak sekaligus kewajiban ASN sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
6. Penguatan peran admin kepegawaian perangkat daerah dan unit kerja, sebagai pendamping teknis ASN dalam pemutakhiran data dan verifikasi dokumen pengembangan kompetensi.
7. Pemulihan dan optimalisasi akses Aplikasi SIDAWAI secara bertahap, melalui koordinasi lintas perangkat daerah untuk pengembangan skema akses yang aman bagi unit kerja di luar jaringan Kominfo, tanpa mengabaikan aspek keamanan data.

3.2.5. Inovasi dan Prestasi

Dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2025 belum menunjukkan capaian inovasi maupun prestasi pada tingkat regional maupun nasional. Program dan kegiatan yang dilaksanakan masih berfokus pada pemenuhan tugas dan fungsi rutin, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pendekatan baru, metode inovatif, serta upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan aparatur masih perlu diperkuat. Pemerintah Kabupaten Blitar memandang hal ini sebagai bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, khususnya melalui

pengembangan inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan kompetensi ASN serta penguatan daya saing aparatur pemerintah daerah.

LAMPIRAN
VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tanggal Pelaksanaan : 15 Oktober 2025
Tempat : Gedung Assesment Center BKD Propinsi Jawa Timur

a. Pelaksanaan Pemetaan Penilaian Kompetensi Level JPTP



Kegiatan pelaksanaan pemetaan penilaian kompetensi level JPT bekerjasama dengan BKD Propinsi Jawa Timur dan dilaksanakan di Gedung *Assesment Center* BKD Propinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Oktober 2025. Pada kegiatan tersebut diikuti sebanyak 18 peserta Eselon IIb.

Link Foto : [Asessment JPT 15 Oktober 2025.jpeg](#)

2. Nama Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Penilaian Kompetensi Bagi Administrator, Pengawas, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, Pelaksana
Tanggal Pelaksanaan : 11 – 12 November 2025
Tempat : Gedung Assesment Center BKD Propinsi Jawa Timur

b. Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Penilaian Kompetensi Bagi Administrator, Pengawas, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, Pelaksana



Kegiatan pelaksanaan kegiatan pemetaan penilaian kompetensi bagi Administrator, Pengawas, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, Pelaksana bekerjasama dengan BKD Propinsi Jawa Timur dan dilaksanakan di Blitar bertempat di Gedung Assesment Center BKD Propinsi Jawa Timur pada tanggal 11 – 12 November 2025. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 554 peserta yang semuanya merupakan pejabat Administrator, Pengawas, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Link Foto : [Assesmen Pro ASN 11-12 November 2025.jpeg](#)

3. Nama Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Level I Tahun 2025
Tanggal Pelaksanaan : 23 Juli 2025
Tempat : Gedung Local Education Center, Garum Kabupaten Blitar



Kegiatan pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Level I Tahun 2025 dan dilaksanakan di Gedung Local Education Center, Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 23 Juli 2025. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 40 peserta terdiri pejabat administrator, pengawas dan pelaksana di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar.

Foto Link : [Diklat PBJ Level I 23 Juli 2025.jpg](#)